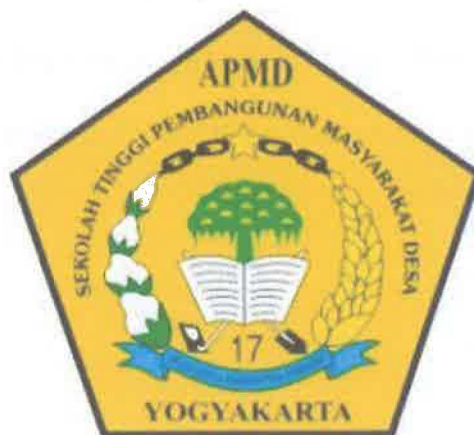


SKRIPSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA

**(Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



DISUSUN OLEH:
DOMINIKUS SAVIO RONALDO DAPPA LOKA
19520173

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA"APMD"
YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA

**(Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Dominikus Savio Ronaldo DappaLoka

19520173

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penuji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:




Hari : Jumat

Tanggal : 20 November 2024

Jam : 10:00 wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

APMD
TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Drs. Jaka Tridaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA</u> Penguji Sampung I	
<u>Minardi, S.IP., M.Sc</u> Penguji Sampung II	

YOGYAKARTA

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

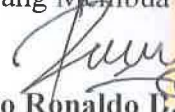
Nama : Dominikus Savio Ronaldo Dappa Loka
Nim : 19520173
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Desember 2024

Yang Membua



Dominikus Savio Ronaldo Dappa Loka

19520173



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun dan disajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Saya Dominikus S. R. D. Loka ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus, berkat kasih karunia dan petunjuk-Nya dalam proses penyusunan dan selesainya skripsi ini. Kehadiran-Nya telah menjadi sumber kekuatan, kebijaksanaan dan ketenangan selama perjalanan akademik ini.
2. Kepada orang tua saya, Bapak Adrianus Adi dan Ibu Marta Dappa Loka.

Terimakasih

telah menjadi kekuatan dalam perjalanan pendidikan saya. Banyak kekecewaan yang saya berikan tapi kalian selalu senantiasa mendukung dan mendoakan anakmu yang nakal ini. Betapa berharganya dukungan, cinta, dan pengorbanan yang diberikan selama ini.

3. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama penulisan skripsi. Dan tentunya saya minta maaf karena mungkin saya jauh dari ekspektasi dan harapan, tetapi saya sangat berterima kasih atas bimbingan bapak selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dikemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si selaku ketua penguji dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing saya dalam banyak hal sampai menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku dosen penguji samping I yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
5. Minardi, S.IP., M.Sc selaku dosen penguji samping II yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

7. Pemerintah Kalurahan Sriharjo serta masyarakat Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik bentuk maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dominikus Savio Ronaldo Dappa Loka

19520173

MOTO

"Jika otak tidak mampu berpikir, maka berpikirlah.

Buktikan bahwa pikiranmu lebih kuat dari segalanya."

(Ronal D.Loka)

"Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,

aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman."

2 Timotius 4:7

Jangan takut, Aku menyertai engkau, jangan gelisah, Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan".

Yesaya 41: 10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D.1 Tujuan Penelitian	10
D.2 Manfaat Peneliitian	10
E. Review Literatur	10
F. Kerangka Konseptual	16
1. Pemberdayaan Masyarakat	16
2. Pengembangan Wisata	19
3. Pemerintah Desa	21
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24

2. Lokasi, Obyek dan subyek Penelitian	25
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	29
BAB II PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KALURAHAN SRIHARJO	33
A. Sejarah Kalurahan Sriharjo	33
B. Kondisi Geografi	35
C. Kondisi Demografi	36
D. Pemerintahan dan Lembaga	43
BAB III PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI KALURAHAN SRIHARJO	69
A. Pengembangan Wisata Oleh Kalurahan Sriharjo	69
B. Pemberdayan Masyarakat	75
BAB IV	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dengan fokus utama pada peran pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Untuk lebih memahami penerapan kebijakan desa wisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta? Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumen. Narasumber penelitian ini mencakup Pemerintah Kalurahan Sriharjo, Pokdarwis, dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Sriharjo mendorong masyarakat untuk memulai pengembangan pariwisata, yang kemudian disikapi dengan kebijakan desa wisata dan pengalokasian anggaran untuk pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut. Kebijakan ini berhasil menciptakan berbagai destinasi wisata berdasarkan potensi yang dimiliki Kalurahan Sriharjo.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Pokdarwis dengan memberikan pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun demikian, tingkat kesadaran dan peran serta pemerintah Kalurahan masih rendah dalam mendukung prakarsa masyarakat, sehingga Pokdarwis belum dapat berperan optimal sebagai penggerak utama pengembangan wisata. Kendala lainnya terkait pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Sriharjo adalah kekurangan dalam kualitas SDM, hubungan antar pihak, serta komitmen yang kurang kuat dalam pembangunan pariwisata.

Kata kunci: Desa Wisata, Pemberdayaan, Pemerintah Kalurahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata memainkan peran penting dalam pembangunan suatu daerah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui devisa. Sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan, pariwisata dapat memfasilitasi terbukanya usaha mikro dan menengah (UMKM) yang mendukung perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Kekayaan alam dan budaya yang dilestarikan dapat menjadi daya tarik besar bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Wisatawan sering kali turut terlibat dalam berbagai kegiatan tradisional sebagai bagian dari perayaan lokal. Dengan demikian, perpaduan antara kekayaan alam dan budaya setempat menjadi nilai tambah yang memperkaya industri pariwisata. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sambil tetap menjaga kelestarian alamnya. Hal ini mendorong pertumbuhan pariwisata pedesaan, yang dikenal dengan istilah desa wisata.

Desa wisata merupakan alternatif menarik bagi wisatawan dengan minat khusus, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Kawasan pedesaan menawarkan berbagai daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan, baik domestik maupun internasional. Keindahan alam, situs

sejarah dan budaya, serta seni dan kerajinan tangan khas masyarakat desa telah lama menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, kekayaan budaya masyarakat desa, seperti adat istiadat dan kehidupan tradisional, dapat dikemas menjadi produk wisata yang sangat menarik bagi wisatawan.

Febriana dan Pangestuti dalam (Istiyanti, 2020) Desa wisata telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberagaman destinasi wisata, menjadikannya lebih dinamis dalam kawasan pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata, khususnya desa wisata, berdampak positif terhadap perekonomian wilayah, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pemerintah desa, meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, dan perbaikan fasilitas yang tersedia bagi masyarakat.

Pengelolaan desa wisata di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menekankan bahwa pengembangan desa wisata akan menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2024. Hal ini termasuk dalam sektor sarana dan prasarana desa wisata, dengan anggaran sebesar 24,6 miliar rupiah untuk mendukung infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan (PDDT, 2023). Dalam prioritas penggunaan dana desa, pemerintah mengutamakan pola Padat

Karya Tunai Desa, yang difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan desa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Program ini mendukung upaya pembangunan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, memungkinkan mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di desanya (Kementerian Desa, 2023). Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 244 desa wisata akan tersertifikasi sebagai desa wisata mandiri. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa-desa wisata memiliki standar yang memenuhi kriteria kualitas dalam pengelolaan pariwisata, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian lokal dan pelestarian budaya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia. Dengan adanya komitmen ini, daerah-daerah yang sebelumnya kurang memandang pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kini terdorong untuk menjadikan wilayahnya sebagai destinasi wisata. Pariwisata pun dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan kekuatan ekonomi baru, terlebih di tengah kondisi krisis global yang sedang berlangsung.

Desa wisata memainkan peran krusial dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Kawasan pedesaan memiliki berbagai daya tarik unik, seperti suasana yang asli dan khas dari kehidupan sosial-ekonomi, budaya, adat istiadat, dan keseharian masyarakat. Selain itu, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, serta kegiatan perekonomian yang menarik, juga menjadi potensi besar yang bisa dikembangkan. Misalnya, atraksi wisata, akomodasi, makanan dan minuman khas, serta berbagai kebutuhan wisata lainnya dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan (SS, 2012).

Pengembangan desa wisata dipandang dapat memberikan berbagai manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata, serta memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, desa wisata diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkenalkan serta mengembangkan seni budaya lokal. Pembangunan desa wisata juga dianggap sebagai aset berharga untuk pengembangan ekonomi wilayah, terutama sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pedesaan. Bagi wisatawan, keberadaan desa wisata diharapkan dapat memperkaya variasi produk wisata, sehingga memberikan pengalaman berwisata yang lebih beragam.

Potensi ekonomi yang dimiliki desa wisata berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang perlu dikelola dengan baik. Hal ini memerlukan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa guna meningkatkan kualitas hidup mereka, yang pada gilirannya juga akan

mendongkrak pendapatan pemerintah daerah dan desa. Untuk itu, masyarakat perlu diberdayakan agar dapat mengelola potensi wisata desa secara efektif. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Desa yang mewajibkan pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan kepada warganya.

Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata memerlukan langkah-langkah yang konkret dari setiap desa yang memiliki potensi wisata. Tujuan utama pemberdayaan ini adalah agar desa wisata menjadi aset produktif yang dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu atau tertinggal, melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang ada di desa mereka (Eko Sudarmanto, 2020).

Gagasan pemberdayaan pada intinya merupakan pengalihan kekuasaan melalui penguatan modal sosial kepada kelompok masyarakat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas mereka serta mencegah kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif (Zubaedi, 2013).

Bantul memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dioptimalkan. Salah satu daya tarik utama adalah keberadaan Desa Wisata yang menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor pendukung seperti kuliner khas setempat, sistem pertanian tradisional, serta tatanan sosial masyarakat yang turut memberikan kekhasan tersendiri pada desa-desa wisata di wilayah tersebut. Dengan demikian,

Bantul menyajikan ragam atraksi wisata yang berpotensi untuk terus dikembangkan guna menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara (Sugiarti et al., 2010). Masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata memiliki peran yang sangat penting sebagai tuan rumah bagi para pengunjung. Sikap dan perilaku mereka seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang dikenal dengan keramahan dan sikap terbuka. Selain itu, penduduk desa wisata juga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan sektor pariwisata, seperti penginapan di rumah penduduk, penjualan cinderamata, dan jasa pemandu wisata. Semua ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat, yang tercapai dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa wisata tersebut (Cahyaningrum, 2021). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat setempat menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif warga lokal diperlukan untuk memastikan proses pembangunan tersebut selaras dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Tanpa dukungan dan kontribusi dari penduduk setempat, pencapaian pembangunan berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul selaras dengan program pembangunan daerah yang berjudul "Makaryo Mbangun Desa" yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Frasa "Makaryo Mbangun Desa" memiliki makna "bekerja membangun desa".

Pembangunan di Kabupaten Bantul dimulai dari tingkat desa, dengan pemerintah desa fokus pada pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, Pasal 26 ayat 1 mengemukakan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan kepariwisataan adalah mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata dan desa budaya. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, pendapatan untuk wilayah tersebut akan meningkat melalui berbagai sumber, seperti retribusi desa wisata, pajak hotel dan restoran, industri makanan, perizinan usaha pariwisata, serta penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal. Salah satu aset yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pantai, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa.

Desa Wisata Srikeminut, yang terletak di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, merupakan contoh desa wisata dengan potensi besar. Nama Srikeminut berasal dari gabungan tiga desa: Sriharjo, Kedungmiri, dan Wunut. Desa Sriharjo menawarkan beragam potensi wisata alam dan budaya, dengan pemandangan alam yang luar biasa, termasuk perbukitan hijau dan sungai yang jernih. Sepanjang sungai, terdapat pondok-pondok yang dapat digunakan wisatawan untuk menginap. Lembah Sungai Oya, yang dikelilingi bukit-bukit hijau, membentang sepanjang 106 kilometer dari Gunung Kidul hingga bermuara di Pantai Selatan Jawa. Tiga destinasi utama di desa ini adalah Bukit Sriharjo, Ngepohsari, dan Padusan Banyu Bening. Di area terasering, wisatawan dapat menikmati pemandangan

persawahan hijau dengan tulisan "Sriharjo" yang dikelilingi pepohonan rindang. Selain itu, terdapat kegiatan Techno Eco Park bagi pengunjung yang ingin mempelajari cara bertani dengan teknik modern. Wisatawan dapat menikmati pemandangan alami, menghirup udara segar kaya oksigen, serta menemukan berbagai spot foto alam yang menarik.

Dalam upaya mengembangkan desa wisata, terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam proses tersebut. Berdasarkan observasi awal di Kalurahan Sriharjo, beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

- a. Pengelolaan belum optimal. Contohnya, belum adanya fasilitas lahan parkir yang memadai, dan penetapan tarif oleh masyarakat yang dilakukan secara sembarangan tanpa aturan yang jelas.
- b. Kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata belum mendapatkan bimbingan atau pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.
- c. Keterampilan masyarakat yang belum difasilitasi dengan baik. Masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu, seperti dalam pembuatan batu akik, tidak diberikan dukungan atau kewenangan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan keterampilan tersebut sebagai bagian dari produk wisata.
- d. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap

perencanaan atau pengelolaan tempat wisata mengakibatkan banyak keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan masyarakat setempat.

Dalam konteks pembangunan desa wisata, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, peneliti mengajukan proposal penelitian dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Penelitian ini akan mengkaji masalah tersebut melalui perspektif Governing, yang merupakan pendekatan dalam disiplin Ilmu Pemerintahan yang fokus pada pengelolaan dan aktivitas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Perspektif ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan dan aktivitas pemerintah desa dapat mendukung pengembangan desa wisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?".

C. Fokus Penelitian

Pengembangan wisata oleh Kalurahan Sriharjo
Pemberdayaan Masyarakat

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat yang berguna melalui pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan pembangunan partisipatif dalam pengembangan wisata srikeminut di Kalurahan Sriharjo.

E. Review Literatur

Secara fundamental, tujuan dari kajian literatur adalah untuk menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata. Tentu saja, riset sebelumnya telah mengungkapkan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata, sehingga penelitian terdahulu akan dijadikan acuan perbandingan bagi penelitian yang akan dilakukan dengan menemukan data

terbaru yang komprehensif.

1. Penelitian Dyah Istiyanti (2020) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan di Desa Sukawening dapat mendukung perkembangan desa wisata. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi peternakan kelinci, budidaya edamame, industri sepatu sandal, serta kegiatan kebudayaan yang dikelola oleh tim Sarapala. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di desa ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Program-program yang telah dilaksanakan mencakup sosialisasi tentang pengembangan desa wisata, yang mencakup topik pemasaran, air dan kesehatan, inventarisasi potensi desa dalam rangka rencana tata ruang desa, serta pelatihan pembuatan biodiesel dan sabun dari minyak jelantah. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata ini memberikan dampak positif terhadap ketahanan budaya lokal, dengan penguatan budaya, khususnya dalam hal panahan, serta beberapa perubahan dalam tata nilai sosial dan lingkungan di desa tersebut.
2. Penelitian Dwi Iriani Margayaningsih (2018) dengan judul Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di desa, dengan fokus pada peran masyarakat sebagai pelaku, partisipan, dan peserta, menunjukkan kategori yang baik. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat adalah motivasi yang tinggi serta kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah terbatasnya anggaran dan sarana prasarana yang ada.

3. Penelitian yang dilakukan Theofilus Retmana Putra (2013) dengan judul Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pokdarwis yang nyata terlihat pada unsur perancangan, implementasi rencana, dan pengelolaan atraksi wisata dengan melibatkan pihak ketiga termasuk didalamnya masyarakat setempat selaku aktor yang berpengaruh. Kerja sama yang baik antara Pokdarwis dengan beberapa stakeholder inilah yang memperkuat eksistensi Desa Wisata Tembi dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang ada disana.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Syah (2017) dengan judul Strategi Mengembangkan Desa Wisata. Kajian ini membahas strategi dalam mengembangkan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis secara eksplanatif terhadap kebijakan pemerintah terkait pengembangan desa wisata. Metode analisis eksplanasi dipilih untuk memaparkan dan menjelaskan kebijakan pemerintah secara rinci dan komprehensif dalam upaya mengembangkan desa wisata sebagai salah satu alternatif pariwisata berbasis masyarakat.
5. tentang pariwisata, terutama desa wisata ini, menemukan bahwa desa wisata memiliki potensi alam antara lain pegunungan, agro, pantai,

budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Peluang desa wisata ini harus mengedepankan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan yang lain sebagai identitas kemudian menjadi satu konsentrasi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan. Untuk itu setiap desa dapat memaksimalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Namun, memutuskan konsep desa wisata dapat dimulai dari tingkat RT hingga kepala desa dengan tetap menerima masukan dan pandangan camat serta walikota/bupati setempat. Dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nuria Salsabila, M Isa Anshori, Ahmad Kamil, Novia Jamilati (2024) dengan judul Strategi Inovatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Industri Parawisata di Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari banyak stakeholder (*public, private, dan society*) sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan pengembangan kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Rara Sugiarti, Istijabatul Aliyah, Galing Yudana (2016) dengan judul Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan

desa wisata perlu direncanakan dengan baik agar dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan pedesaan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan fungsi dan intensitas penggunaan tanah di daerah pedesaan sebagai daerah tujuan wisata, meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang diberikan di desa wisata, mengarahkan pengembangan desa wisata secara lebih jelas sehingga pembangunan fisik maupun non fisik dalam konteks pengembangan desa wisata dapat berjalan selaras, serasi, dan seimbang. Arah pengembangan desa wisata antara lain adalah mengoptimalkan fungsi kawasan pedesaan sebagai kawasan wisata, meningkatkan peran desa wisata sebagai area publik yang menekankan harmoni antara lingkungan, pendidikan dan ekonomi, serta meningkatkan peran kawasan pedesaan yang menawarkan kegiatan rekreasi dan berbagai ragam kegiatan wisata pedesaan lainnya.

8. Penelitian yang dilakukan Oleh Suwarti dan Hendry Yuliamir (2017) Dengan Judul Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Kampung Keji Sebagai Atraksi Wisata Guna Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang. Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Kampung Keji Sebagai Atraksi Wisata Guna Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Pramana, Yelly Zamaya, Ardian Ardian, Afrinald Rizhan (2022) dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Pada Desa Wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau, khususnya di Desa Wisata

Pulau Belimbing, sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait penerapan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Maruf (2022) dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jurug telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan, program, dan pembinaan dengan baik. Namun, dalam implementasi program dan pembinaan, masih terdapat beberapa kekurangan. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain kurangnya tindak lanjut sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan alokasi dana, serta permasalahan limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Meskipun Pemerintah Desa Jurug telah melakukan upaya pembinaan di bidang ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan, namun upaya pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum maksimal karena belum adanya lembaga kepemudaan sebagai wadah partisipasi pemuda dalam program yang dijalankan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Jurug harus memperkuat perannya dalam mengimplementasikan kebijakan, mencari solusi atas penghambat program desa wisata, serta menyediakan fasilitas di bidang kepemudaan dan keagamaan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kesamaan dengan penelitian ini, di mana penelitian-penelitian terdahulu juga membahas konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks Desa Wisata. Namun, penelitian ini berbeda karena akan mengidentifikasi alasan di balik pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata, dengan kaitannya terhadap perspektif tata kelola pemerintahan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada peran Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung pengembangan Desa Wisata.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sutoro Eko di dalam Cholisin, pemberdayaan merupakan sebuah proses guna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Cholisin, 2011). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya)

kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Hal ini kemudian menurut Sutoro eko dalam Cholisin, masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Cholisin, 2011).

Menurut Kartasasmita di dalam Dwi Iriani, mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai (Margayaningsih, 2018):

1. Sarana untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik maupun social.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)) (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007, 2007). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat

merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto dalam Dwi Iriani (Margayaningsih, 2018) paling tidak memiliki empat hal, yaitu merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Terdapat dua faktor pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat 1. Motivasi, dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak. 2. Kebijakan Pemerintah Kebijakan—kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia (Margayaningsih, 2018).

Sedangkan dua faktor penghambat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat 1. Anggaran, adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. 2. Sarana dan Prasarana Menurut Soepartono dalam Dwi Iriani Margayaningsih, yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat (Margayaningsih, 2018).

2. Pengembangan Wisata

Pengembangan adalah strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan mengalami peningkatan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya (Auliya & Farrah, 2019). Menurut Yoeti dalam Suwarti dan Yuliamir, menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut (Suwarti, 2015).

Menurut Suwarti dan Yuliamir (Suwarti & Yuliamir, 2017), menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata itu terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, yaitu:

1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan segala kegiatan pariwisata.
2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan pariwisata.
3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.

Menurut Yoeti di dalam Arwandi (Arwandi, 2016), dalam pengembangan sebuah pariwisata itu terdapat 4 prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Keberlangsungan ekologi artinya suatu pengembangan dalam pariwisata dapat menjamin pemeliharaan terhadap wisata tersebut.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya artinya dengan adanya pengembangan pariwisata membuat peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan dan budaya sehari-hari.
3. Keberlangsungan ekonomi artinya suatu pengembangan pariwisata yang menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat artinya memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

Santi berpandangan dalam Salasabila dkk, pengembangan suatu pariwisata sangat diperlukannya sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya

sebuah pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut (Salsabila et al., 2024).

3. Pemerintah Desa

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat secara hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan kepentingan masyarakat dengan cara mengurus dirinya sendiri, berangkat dari asal usul dan adat-istiadat tersebut Negara Indonesia harus menghormatinya (PP Nomor 72 Tahun 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kemudian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.

Asas-Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Pasal 18, UU 6 Tahun 2014).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kewenangan pemerintah Desa. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi self-governing community dan local self-government. Self governing community masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak

terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan local self government yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Setraus dan Corbin, sebagaimana dikutip dalam Suyitno (2018), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini cocok untuk meneliti aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang lebih dalam dan kompleks, yang sering kali sulit dipahami melalui metode kuantitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menelaah suatu objek penelitian yang dideskripsikan berdasarkan data-data sekunder yang dianalisis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi, sementara analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang ditemukan, daripada pada generalisasi.

Dengan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara rinci dan menyeluruh fenomena yang terjadi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata di Desa Sriharjo.

2. Lokasi, Obyek dan subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi, objek, dan subjek penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sriharjo.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari 4 orang yang melibatkan berbagai pihak

terkait, yaitu Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata, Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat setempat. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian dan kemampuan mereka dalam memberikan data serta informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposif, di mana peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang sah. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) 2 orang dari Pemerintah Desa Sriharjo (Kepala Desa dan Carik), 2) 1 orang Pengelola Desa Wisata (Sub pengelola wisata), 3) 1 orang Masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Arikunto, seperti yang dikutip oleh Feny Rita Fiantika dan koleganya, observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek dan subjek penelitian secara teliti menggunakan semua indera. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku serta makna yang terkandung dalam perilaku tersebut (Feny Rita Fiantika et al, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan empat kali observasi. Melalui kegiatan observasi tersebut, peneliti memperoleh pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, potensi lokal yang meliputi aspek fisik dan non-fisik, serta berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi di Desa Sriharjo. Proses observasi ini dilakukan dengan cermat terhadap objek dan subjek penelitian, menggunakan indra penglihatan dan pendengaran.

b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Mulyadi, seperti yang dikutip oleh Feny Rita Fiantika dan rekan-rekannya, menjelaskan bahwa metode wawancara mendalam adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu langsung untuk saling mendengarkan informasi atau keterangan yang disampaikan (Feny Rita Fiantika et al, 2022). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi penting melalui pertanyaan langsung yang diajukan oleh pewawancara kepada narasumber, dengan hasil jawaban yang kemudian dicatat atau direkam. Teknik wawancara umumnya dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*), namun dapat juga dilakukan melalui telepon atau dalam kelompok fokus. Hal yang sangat penting dalam teknik wawancara adalah pencatatan informasi yang diberikan oleh partisipan, baik itu melalui catatan tangan, rekaman audio, maupun video. Pencatatan ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan pada rekaman, agar data tetap tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian.

Selama proses wawancara, peneliti menemui kendala dalam menyelaraskan waktu dengan informan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam Feny Rita Fiantika Dkk (Feny Rita Fiantika et al, 2022), Dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian, yang berisi catatan peristiwa masa lalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan seperti cerita, biografi, atau peraturan, maupun berbentuk gambar seperti foto. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Jenis dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian antara lain:

- 1) Hasil wawancara dengan narasumber

- 2) Foto

- 3) Video

- 4) Catatan penelitian

- 5) Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara tatap muka dan daring. Semua hasil wawancara telah didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan terrekam, untuk memudahkan proses analisis. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen profil desa, arsip kantor, dan artikel berita yang diterbitkan oleh jurnalis di majalah serta surat kabar.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data mengikuti model yang diajukan oleh Huberman dan Miles, sebagaimana dijelaskan dalam karya Suyitno. Model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengolah dan memaknai informasi kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber data (Suyitno, 2018). Dengan prosedur yang ditempuh sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data dilaksanakan setelah penarikan konklusi yang didasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan serangkaian pernyataan atau ringkasan yang dapat berfungsi sebagai temuan penelitian yang berlaku secara universal.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif yang berfungsi untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan cara membuang informasi yang tidak relevan. Proses ini dilakukan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dengan lebih mudah dari data yang telah disaring dan diorganisasikan secara sistematis.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Presentasi data merupakan salah satu metode dalam analisis data kualitatif. Kegiatan ini melibatkan penyusunan informasi secara sistematis

yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Bentuk presentasi data kualitatif dapat berupa narasi teks (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, maupun diagram.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing/Verification*)

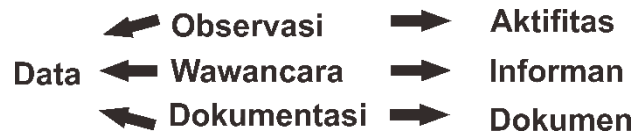
Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik dalam analisis data kualitatif. Proses ini dilakukan untuk memverifikasi data yang telah diperoleh dengan tujuan mencari makna, mencatat pola keteraturan, serta hubungan sebab akibat yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sementara yang masih bersifat longgar dan terbuka. Setelah data terkumpul dari lapangan melalui penelitian, langkah selanjutnya adalah mengarah pada penarikan kesimpulan akhir. (Suyitno, 2018).

e. Validasi Data

Menurut William dalam Sugiyono yang ditulis oleh Feny Rita Fiantika Dkk (Feny Rita Fiantika et al, 2022) "*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures*".

Dalam upaya untuk memvalidasi kredibilitas data, proses triangulasi melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang beragam dan dalam rentang waktu yang berbeda. Triangulasi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Konsep triangulasi sumber dapat divisualisasikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.2 Triangulasi data/sumber



Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk memastikan validitas dan keandalan temuan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kalurahan Sriharjo, triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari tiga sumber utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing sumber dan bagaimana triangulasi digunakan untuk menarik kesimpulan:

1. Observasi:

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dinamika masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi aktual, pola interaksi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

2. Wawancara:

Wawancara dengan informan kunci seperti pemerintah Kalurahan, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan warga setempat memberikan data kualitatif yang mendalam. Informan ini memberikan perspektif tentang proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta peran mereka dalam pengembangan pariwisata di desa.

3. Dokumentasi:

Dokumentasi mencakup data yang relevan seperti laporan, foto, hasil wawancara, dan catatan penelitian yang mendukung temuan. Dokumentasi ini memberikan bukti konkret yang membantu mengkonfirmasi atau memperjelas hasil observasi dan wawancara.

4. Proses Triangulasi:

Dalam penelitian ini, triangulasi berfungsi untuk menguji konsistensi dan saling melengkapi antara data dari tiga sumber tersebut. Misalnya, jika data yang diperoleh dari wawancara sejalan dengan temuan yang tercatat dalam dokumentasi atau dapat diverifikasi melalui observasi, maka hasil tersebut lebih bisa dipercaya dan dianggap valid.

D. Kesimpulan:

Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih kuat dan akurat. Analisis yang melibatkan ketiga sumber data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, baik dari segi program pemerintah, peran masyarakat, maupun potensi yang ada di lapangan. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak hanya berdasarkan satu jenis data, tetapi merupakan hasil integrasi dari berbagai perspektif yang ada.

BAB II

PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KALURAHAN SRIHARJO

A. Sejarah Kalurahan Sriharjo

Desa Sriharjo terbentuk pada tahun 1946. Penamaan 'Sriharjo' berasal dari kondisi geografis wilayah dan mata pencaharian penduduknya. Berdasarkan mitos Jawa, istilah 'Sriharjo' merupakan gabungan dari kata 'Sri' yang merupakan nama Dewi Sri dan 'harjo' yang berarti raharjo atau sejahtera. Dengan demikian, nama Sriharjo memiliki arti desa yang makmur dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Pada awalnya, Desa Sriharjo merupakan penggabungan dari tiga desa lama, yaitu:

1. Kalurahan Mojohuro
2. Kalurahan Dogongan
3. Kalurahan Kedungmiri

Adapun cikal bakal Pamong Kalurahan/Perangkat Kalurahan Sriharjo adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Lurah | : Sosro Margono |
| 2. Carik | : Wardo Sumiyarso |
| 3. Jogoboyo | : Sastro Suharjono |
| 4. Sosial | : Kami Rejo |
| 5. Ulu-Ulu | : Sastro Sarjono |
| 6. Modin | : Chundori |

Pada masa transisi penggabungan, kantor sementara beroperasi di

kediaman Bapak Sosro Margono yang terletak di Padukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951, sebuah kantor baru untuk Pemerintah Kalurahan Sriharjo dibangun di atas tanah milik desa yang berada di wilayah Padukuhan Mojohuro.

Berikut pembagian wilayah padukuhan Kalurahan Sriharjo pada saat itu:

1. Padukuhan Miri
2. Padukuhan Jati
3. Padukuhan Mojohuro
4. Padukuhan Pelemadu
5. Padukuhan Sungapan
6. Padukuhan Gondosuli
7. Padukuhan Trukan
8. Padukuhan Dogongan
9. Padukuhan Ketos
10. Padukuhan Ngrancah
11. Padukuhan Pengkol
12. Padukuhan Sompok
13. Padukuhan Wunut

B. Kondisi Geografi

Desa Sriharjo adalah salah satu dari delapan desa di Kecamatan Imogiri, terletak di pertemuan Sungai Oya dan Sungai Opak. Kedua sungai ini berfungsi sebagai batas alami desa sekaligus sumber utama irigasi untuk pertanian di bagian selatan dan barat desa. Desa ini berada pada koordinat 110,3964 LS/LU dan 7,94892 BT/BB, dengan luas wilayah 502,36 hektar. Populasi Desa Sriharjo mencapai 9.439 jiwa, yang terbagi dalam 3.020 kepala keluarga. Lokasinya berjarak sekitar 3 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 10 km dari pusat kabupaten, 17 km dari pusat kota, dan 17 km dari ibu kota provinsi.

Batas wilayah Desa Sriharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Kebonagung di Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan di Kecamatan Dlingo
- Sebelah selatan: Desa Selopamioro di Kecamatan Imogiri
- Sebelah timur: Desa Mangunan di Kecamatan Imogiri
- Sebelah barat: Desa Srihardono di Kecamatan Pundong

C. Kondisi Demografi

Secara keseluruhan, Kalurahan Sriharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.478 jiwa, yang terdiri dari 4.666 jiwa laki-laki dan 4.812 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di kalurahan ini adalah 3.517. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

1. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Persebaran penduduk Desa Sriharjo berdasarkan pekerjaan dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Petani	131	144	275
Buruh Tani	233	265	498
Pegawai Negeri Sipil	69	58	127
Pedagang barang kelontong	3	8	11
Peternak	0	0	0
Nelayan	1	0	1

Montir	3	0	3
Perawat swasta	3	16	19
Bidan swasta	0	2	2
TNI	17	0	17
POLRI	18	1	19
Guru swasta	16	44	60
Dosen swasta	2	1	3
Seniman/artis	2	0	2
Pedagang Keliling	35	89	125
Tukang Kayu	7	0	7
Tukang Batu	9	0	9
Pembantu rumah tangga	0	1	1
Pengacara	0	1	1
Karyawan Perusahaan Swasta	419	329	748
Karyawan Perusahaan Pemerintah	4	3	7
Wiraswasta	722	657	1.379
Belum Bekerja	1.011	1.078	2.089

Pelajar	651	669	1.320
Ibu Rumah Tangga	0	372	372
Purnawirawan/Pensiunan	72	10	82
Perangkat Desa	16	0	16
Buruh Harian Lepas	1.173	1.011	2.184
Pemilik perusahaan	1	1	2
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	1	0	1
Kontraktor	0	0	0
Sopir	4	0	4
Tukang Jahit	3	8	11
Tukang Rias	0	1	1
Karyawan Honorer	9	7	16
Jumlah Total (Orang)	4.635	4.776	9.411

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat SD/ sederajat	2.500
2.	Tamat SLTP/ sederajat	1.450
3.	Tamat SLTA/ sederajat	2.373
4.	Diploma I	37
5.	Diploma III	135
6.	Strata I	404
7.	Strata II	9
8.	Strata III	1
Total		6.909

(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo 2023)

Berdasarkan data yang disampaikan, mayoritas penduduk Kalurahan Sriharjo memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sebagian besar penduduk hanya memiliki pendidikan setingkat SD atau SLTP, yang menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kalurahan tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang dapat disimpulkan:

1. Tingkat Pendidikan yang Rendah:

Dengan 2.500 jiwa lulusan SD/ sederajat dan 1.450 jiwa lulusan SLTP/ sederajat, ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Sriharjo belum mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan taraf hidup secara signifikan.

2. Peran Pendidikan SLTA:

Terdapat 2.373 jiwa yang lulus SLTA/ sederajat, yang berarti ada sebagian masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Ini dapat menjadi landasan yang penting untuk upaya-upaya peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor-sektor ekonomi lokal seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata.

3. Tantangan Perguruan Tinggi:

Hanya 586 jiwa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di tingkat Diploma atau Strata. Ini menunjukkan keterbatasan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, atau rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan lanjutan.

4. Dampak terhadap Pemberdayaan Masyarakat:

Pendidikan yang terbatas pada sebagian besar penduduk dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Program peningkatan keterampilan dan pelatihan berbasis lokal, seperti pelatihan

UMKM, keahlian teknis, dan pengembangan pariwisata, sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah.

5. Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan:

Agar Kalurahan Sriharjo dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, perlu ada upaya sistematis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan infrastruktur pendidikan (sekolah, fasilitas, dan pelatihan).
- b. Menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk mendorong siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- c. Menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal, termasuk dalam bidang pariwisata, pertanian, dan UMKM.

Secara keseluruhan, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang telah melanjutkan pendidikan tinggi, mayoritas masyarakat Kalurahan Sriharjo masih perlu diberdayakan melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mempercepat pembangunan desa.

3. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Data Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0 s/d 6 Tahun	814
2.	7 s/d 12 Tahun	779
3.	13 s/d 18 Tahun	813
4.	19 s/d 25 Tahun	827
5.	26 s/d 40 Tahun	2.029
6.	41 s/d 55 Tahun	1.945
7.	56 s/d 65 Tahun	1.181
8.	66 s/d 75 Tahun	671
9.	75 Tahun ke atas	441
Total		9.500

(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo Tahun 2023)

Dari tabel yang ada, diketahui bahwa populasi penduduk Kalurahan Sriharjo paling banyak terdapat pada kelompok usia 26 hingga 40 tahun, dengan jumlah 2.029 jiwa, yang termasuk dalam kategori orang tua. Meskipun usia ini masih tergolong dalam usia produktif dalam dunia kerja, individu pada kelompok ini sudah mulai mengalami kerentanan karena usianya yang lebih tua. Secara umum, usia produktif dalam dunia kerja dapat dikategorikan antara 15 hingga 59 tahun, sementara usia non-

produktif terdiri dari kelompok usia 0 hingga 14 tahun (masih dalam usia pendidikan) dan 60 tahun ke atas (lanjut usia).

Berdasarkan perhitungan tersebut, total angkatan kerja di Kalurahan Sriharjo mencakup 5.155 jiwa penduduk yang termasuk dalam kategori usia produktif. Sementara itu, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori usia non-produktif adalah 2.705 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang berada dalam usia non-produktif.

D. Pemerintahan dan Lembaga

1. Pemerintah Kalurahan Sriharjo

a. Visi dan Misi

Visi:

“Menuju Sriharjo Mandiri, Berdaulat, Demokratis, Religius, Dan Sejahtera”.

Mandiri Dan Berdaulat

Kemandirian dan kedaulatan Desa Sriharjo bermakna bahwa desa ini memiliki otonomi dalam mengatur urusan dan kehidupan bermasyarakat tanpa campur tangan pihak luar, sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa. Namun, kemandirian ini bukan berarti Sriharjo tidak membutuhkan bantuan dari pihak luar seperti pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau swasta. Desa Sriharjo tetap menjunjung

tinggi NKRI dan siap berkontribusi untuk membangun kejayaan negara yang dimulai dari tingkat desa.

Desa Sriharjo terbuka terhadap segala bentuk kerjasama yang membangun dengan pihak luar, baik perguruan tinggi, LSM, maupun swasta, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kedaulatan dan kehormatan desa harus tetap dijaga dalam kerangka kerjasama ini.

Untuk mencapai kemandirian, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya sumber pendanaan sendiri (Pendapatan Asli Desa-PADes). Dengan PADes, Desa Sriharjo akan lebih leluasa dalam mengelola anggaran dan menyelenggarakan program-program yang bertujuan mengangkat harkat hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 tahun ke depan, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, BPD, serta kerjasama dengan berbagai pihak, Pemerintah Desa Sriharjo bertekad meningkatkan PADes dengan cara mengoptimalkan segenap aset (material dan non material-SDM) yang dimiliki desa, dan membangun BUMDesa.

Kedaulatan desa juga tercermin dalam budaya masyarakat. Sebagai bagian dari NKRI, Sriharjo memiliki budaya adiluhung yang merupakan bagian dari bentuk kedaulatan bangsa, seperti sikap gotong royong, tepo seliro, saling menghormati, toleran, dan lain-lain, serta seni budaya yang terbangun. Pemerintah Desa Sriharjo bertekad untuk memperkuat budaya tersebut, baik dalam bentuk sikap dan perilaku

maupun pengembangan seni budaya lokal Sriharjo selama enam tahun ke depan. Dengan demikian, harapan adanya kedaulatan budaya di Desa Sriharjo benar-benar dapat terwujud.

Demokratis

Desa Sriharjo yang demokratis tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, bertanggung jawab, jujur, adil, bebas dari korupsi, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kehidupan bermasyarakat di Desa Sriharjo juga menunjukkan sikap demokratis, di mana terjadi saling menghormati di antara warga.

Kehidupan demokratis juga diharapkan tercermin dalam proses pengambilan keputusan di kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari keluarga, RT, Pedukuhan, hingga organisasi kemasyarakatan yang ada. Pengambilan keputusan diharapkan dilakukan melalui musyawarah, saling menghormati, dan melibatkan seluruh komponen dalam kelompok tersebut. Sikap demokratis juga diharapkan dimiliki oleh setiap warga Desa Sriharjo untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berdesa yang demokratis.

Religius

Religiusitas masyarakat Sriharjo tercermin dalam pola kehidupan mereka yang senantiasa mendasarkan setiap aktivitas pada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap individu senantiasa berhati-hati dalam melangkah agar dapat berbuat kebaikan

dan menghindari perbuatan tercela.

Sejahtera

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi. Pertama, masyarakat harus berkecukupan dalam hal pangan, sandang, dan papan. Kedua, masyarakat harus mendapatkan jaminan kesehatan, terpenuhi kebutuhan pendidikan dasar, hidup aman dan tenteram, tercukupi hiburan dan hobinya, terbebas dari ancaman kekerasan dan bencana alam, serta tidak mengalami stigma maupun diskriminasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Sriharjo akan lebih memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, warga miskin, anak-anak, dan penyandang disabilitas agar terhindar dari kekerasan, stigma, dan diskriminasi.

Untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Desa Sriharjo, Pemerintah Desa bertekad memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pangan masyarakat, kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan pangan lokal, serta membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di Desa Sriharjo.

Ketahanan pangan harus diikuti dengan kedaulatan atas pangan. Ketahanan pangan berarti tercukupinya kebutuhan pangan bagi masyarakat Desa Sriharjo. Untuk menjamin ketahanan pangan, dibutuhkan kedaulatan atas pangan. Desa memiliki beragam varietas

pangan yang dapat dihasilkan dari tanah sendiri, cocok, serta mudah dikembangkan di tanah setempat. Namun, hal ini seringkali tergilas oleh opini dan pasokan pangan dari luar. Salah satu contohnya adalah gandum. Masyarakat Desa Sriharjo sangat akrab dengan gandum dan mengonsumsinya hampir setiap hari. Padahal, secara konkret, desa ini tidak mampu memproduksi gandum. Hal ini tentu mengancam ketahanan pangan jika masyarakat bergantung pada varietas pangan seperti ini, karena desa tidak dapat memproduksi sendiri jenis pangan tersebut. Ancaman terhadap ketahanan pangan dapat terlihat dari ancaman terhadap perputaran perekonomian, yang disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang lebih memilih konsumsi pangan dari luar, ketimbang mengutamakan pangan lokal yang seharusnya bisa diproduksi sendiri.

Untuk membangun ketahanan pangan di Desa Sriharjo, upaya dimulai dari langkah-langkah sederhana, seperti mengoptimalkan lahan pekarangan dan menanam tanaman pangan menggunakan polybag di setiap rumah, serta beternak untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah dengan memulai kembali pembangunan lumbung pangan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi krisis pangan. Lumbung pangan ini bisa berupa lumbung hidup atau sekadar penyimpanan bahan pangan (stok). Tentu saja, hal ini hanya dapat terwujud jika ada kesadaran di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan gerakan kolektif menjadi langkah yang sangat penting. Demikian juga untuk meraih kedaulatan pangan, yang hanya dapat dicapai dengan membangun kesadaran dan gerakan

untuk mencintai serta mengutamakan pangan lokal.

Misi:

Setiap misi memiliki tujuan yang saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan holistik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap misi tersebut:

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:** Fokus ini mengarah pada peningkatan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal administrasi kependudukan, pertanahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi warga desa untuk memperoleh layanan yang berkualitas dan tepat waktu.
2. **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif:** Menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa berkomitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan mengutamakan prinsip keadilan gender serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
3. **Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes):** Pengembangan PADes melalui optimalisasi aset desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan

yang mandiri. Ini akan mendukung keberlanjutan pembangunan desa tanpa tergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah.

4. **Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Kreatif dan Pariwisata:** Pembangunan ekonomi desa melalui sektor kreatif dan pariwisata akan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan mengoptimalkan teknologi tepat guna dan informasi, pengembangan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata desa dan menciptakan produk lokal yang bernilai tinggi.
5. **Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan:** Upaya untuk mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan desa guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini juga melibatkan intensifikasi dan diversifikasi lahan pekarangan serta mendorong masyarakat untuk mencintai dan mengonsumsi pangan lokal.
6. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan:** Fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat. Melalui kolaborasi dengan instansi terkait, pemerintah desa mendorong lahirnya gerakan sadar pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan sehat.
7. **Mengembangkan Potensi Budaya, Olahraga, dan Kepemudaan:** Pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi budaya, olahraga, dan kepemudaan bertujuan untuk membangun karakter masyarakat yang religius dan menciptakan generasi muda yang

berkualitas. Hal ini juga berperan dalam menjaga kebudayaan lokal agar tetap lestari.

8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Difabel: Upaya untuk meningkatkan peran serta perempuan, memberikan perlindungan bagi anak-anak, serta meningkatkan kesejahteraan difabel di desa. Melalui program-program pemberdayaan, diharapkan terjadi kesetaraan gender dan inklusi sosial.
9. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana: Fokus pada keberlanjutan lingkungan hidup dengan mengimplementasikan program-program pelestarian lingkungan serta mitigasi bencana. Pemerintah desa berupaya untuk mengurangi risiko bencana melalui berbagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Dari pemaparan visi dan misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kalurahan Sriharjo memiliki fokus yang jelas dalam mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga fokus utama pembangunan yang diusung:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab dan Bersih:

Pemerintah Kalurahan Sriharjo menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada pembangunan yang lebih baik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi,

masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dijalankan.

2. Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat:

Fokus ini melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mengarah pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok masyarakat. Pemerintah Kalurahan Sriharjo berupaya untuk membangun kemandirian masyarakat melalui berbagai pembinaan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan. Kemandirian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kultural masyarakat.

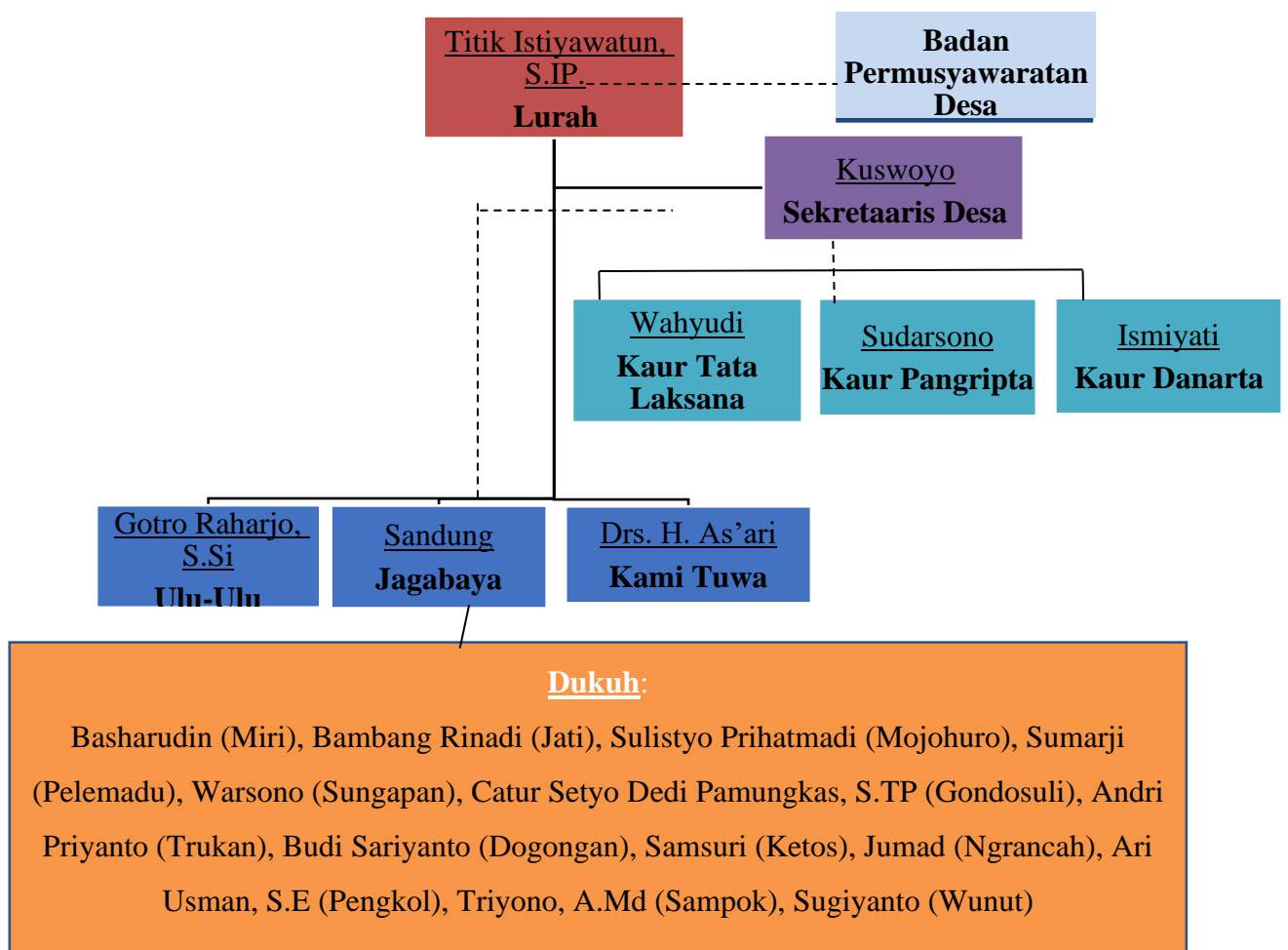
3. Peningkatan Perekonomian Melalui Diversifikasi Sumber Pendapatan:

Pemerintah Kalurahan Sriharjo memahami pentingnya diversifikasi sumber pendapatan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, mereka mengoptimalkan berbagai pilar pendapatan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), serta sumber dari swasta, investor, dan yayasan. Ini memberikan ruang bagi kemitraan dan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, visi dan misi tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang holistik, di mana aspek pemerintahan yang bersih, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi menjadi prioritas utama. Pemerintah Kalurahan Sriharjo berusaha menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahap pembangunan

b. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur Pemerintah Kalurahan Sriharjo



(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo Tahun 2023)

Struktur Pemerintahan Kalurahan Sriharjo yang terdiri dari 22 orang perangkat, dengan komposisi 16 laki-laki dan 6 perempuan, menunjukkan bahwa pemerintahan di Kalurahan Sriharjo telah berhasil mengisi seluruh posisi yang ada. Meskipun jumlah perempuan yang terlibat masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, hal ini menunjukkan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa.

Keberagaman dalam struktur pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai perspektif, termasuk yang berasal dari perempuan, dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, keterlibatan perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih seimbang, mengingat perempuan sering kali lebih terhubung langsung dengan kegiatan sosial dan pemberdayaan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Jika Kalurahan Sriharjo berfokus pada peningkatan representasi perempuan di berbagai sektor pemerintahan dan pemberdayaan, hal ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan dan program yang ada, serta memastikan keberagaman suara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal:

- 1) Semua posisi dalam pemerintahan Kalurahan telah terisi, bahkan dengan tambahan 4 orang staf pamong, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Kalurahan Sriharjo ke depannya.
- 2) Tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) pemerintah Kalurahan Sriharjo cukup memadai, dan secara keseluruhan,

para perangkat pemerintahan masih berada dalam kelompok usia produktif.

- 3) Komposisi jenis kelamin dan usia menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Sriharjo telah memberikan kesempatan bagi perempuan dan kaum muda untuk berpartisipasi dalam struktur pemerintahan, yang mencerminkan adanya kesetaraan gender dan demokratisasi dalam lembaga pemerintahan Kalurahan Sriharjo.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo

No.	Nama	Gender (L/P)	Jabatan
1.	Tutik Nuryati	P	Ketua
2.	Bambang Wicaksono, A.P	L	Wakil Ketua
3.	Endiyanto, S.Kom	L	Sekretaris
4.	Bety Hadi Soewarno	P	Ketua Bidang 1
5.	Agus Salim As Shidiq, S.H	L	Ketua Bidang 2
6.	Bonadi	L	Anggota

			Bidang
7.	Hadi Susianto	L	Anggota Bidang

(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo Tahun 2024)

Berdasarkan komposisi struktur organisasi, diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sriharjo terdiri dari 9 orang anggota, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Komposisi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan harus memiliki jumlah ganjil, dengan minimal 5 orang dan maksimal 9 orang, serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan

Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dwi Santoso	Direktur
2.	Supriyanto	Sekretaris
3.	Suliyatmi	Bendahara
4.	Wahyudi	Manajer Operasional
5.	Sunyi	Ka. Unit Usaha

	Setiyawan	BBM
--	-----------	-----

(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo 2024)

Keanggotaan pengurus BUMKal Sejahtera Pucung yang terdiri dari 5 orang, yaitu Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manajer Operasional, dan Kepala Unit Usaha BBM, memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan usaha yang dijalankan oleh BUMKal. Saat ini, BUMKal Sejahtera Pucung fokus pada pengembangan unit usaha di sektor Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama dalam penyediaan solar. Langkah ini diambil mengingat tantangan geografis, yaitu jarak yang cukup jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang menyebabkan kesulitan dalam pasokan bahan bakar untuk masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan adanya unit usaha ini, BUMKal Sejahtera Pucung berusaha memenuhi kebutuhan pasokan solar yang meningkat, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan BUMKal di sektor ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan desa serta memperkuat ekonomi lokal, yang pada gilirannya mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

2. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Daftar Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Sriharjo

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Jiwa
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)	70
2.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	19
3.	Karang Taruna	23
4.	Rukun Tetangga (RT) – Rukun Warga (RW)	41
5.	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	25

(Sumber: Profil Kalurahan Sriharjo Tahun 2023)

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan RT/RW di Kalurahan Sriharjo memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi koordinasi antara berbagai tingkat kelembagaan, serta memastikan bahwa program-program pembangunan

dan bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat diterima dengan baik dan efektif.

Peran lembaga-lembaga ini sangat mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, LPMK berperan dalam merencanakan dan mengelola program pemberdayaan masyarakat, PKK mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna fokus pada pemberdayaan pemuda, dan RT/RW berfungsi sebagai pelaksana kegiatan di tingkat komunitas. Dengan adanya sinergi antara pemerintah Kalurahan dan lembaga-lembaga tersebut, diharapkan program-program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan sukses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalurahan Sriharjo.

Pengembangan desa wisata dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian. *Perencanaan*. Dalam sebuah proses pengembangan desa wisata, tahap perencanaan merupakan sebuah proses awal atau dasar yang sangat penting dilakukan. Perencanaan menjadi kekuatan awal bagi sebuah program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan dikemudian hari. Tujuan perencanaan dalam pengelolaan suatu pariwisata agar semua program-program atau kegiatan yang ingin dilakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana atau capaian target yang diinginkan. Perencanaan juga memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan terjadi

dikemudian hari. Perencanaan menjadi dasar atau kekuatan terlaksananya tahapan-tahapan lain. Maka sangat penting dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan matang dalam sebuah kegiatan atau program.

Terbentuknya desa wisata Srikeminut murni atas prakarsa masyarakat. beberapa masyarakat sudah mampu dan jeli melihat dan mendata potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Wisata Srikeminut, khususnya potensi alam dan kebudayaan yang ada di desa. Sehingga hal ini yang menurut mereka bisa di jadikan wisata dan tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang kedua Pak Suwandi selaku pemakarsa, memanfaatkan jaringan atau relasinya yang ada untuk diskusi dan bertukar pikiran terkait rencana pembentukan desa wisata. Berkat relasi dan jaringan yang ada mempermudah urusan mereka untuk proses dijadikan desa wisata. Yang ketiga gencar dilakukan sosialisasi ditengah masyarakat sehingga masyarakat bisa dengan mudah memahami maksud dan tujuan terbentuknya desa wisata. yang ke empat desa wisata ini konsepnya yaitu alam dan kebudayaan. Dimana para wisatawan di harapkan dapat menikmati keindahan alam yang masih asli serta suasana pedesaan dan juga wisatawan dapat menikmati kegiatan Techno Eco Park atau kegiatan bertani dengan tehnik modern. Sedangkan untuk wisata budaya, di Srikeminut ada pertunjukan Gejog Lesung, Gejog Lesung merupakan seni musik yang instrumennya menggunakan alat penumbuk paditradisional. Kelima, konsep *slow tourism*, hal ini di harapkan agar para wisatawan bisa lebih lama untuk

menikmati destinasi wisata yang ada sehingga bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat hal ini di tunjang dengan dibuatkan *home stay* yang berbentuk rumah kuno jawa namun karena terjadi bencana jadinya home stay yang tersedia sekarang mengikuti masing-masing model rumah warga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informasi diatas dapat di lihat bahwa dalam proses perencanaan terlihat sedikit elitis. Hal ini di tunjukan dengan gaya komunikasi yang di lakukan Pak Suwandi sebagai pemakarsa selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok elit baik dari tingkat kabupaten sampai pada level pemerintah pusat sementara disisi lain dinamika komunikasi bersama masyarakat terlihat tidak maksimal. Hal lain yang di temukan juga ialah bahwa desa Sriharjo merupakan desa rawan bencana khususnya daerah Srikeminut merupakan salah satu daerah yang rawan akan terjadi bencana dan para pemakarsa tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembentukan desa wisata akibatnya ketika terjadi bencana alam banyak kerusakan di wilayah srikeminut dan membuat aktivitas desa wisata tidak bisa berjalan.

Pelaksanaan, atau penggerakkan (*actuating*), dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit / satuan kerja yang dibentuk. Diantaranya kegiatan tersebut adalah melakukan

pengarahan, bimbingan dan komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi: pengesahan rencana dan pentahapan program (fasilitas, sarana prasarana, koordinasi dan kerja sama).

1)Pengesahan rencana (sasaran, tujuan dan kebijakan umum)

Maksud dan Tujuan dengan tumbuhnya desa wisata di harapkan:

- a.Terciptanya sebuah wilayah agar lebih tertata dan meningkat lebih baik
- b.Pelestarian lingkungan alam, tradisi dan budaya.
- c.Tersedianya sarana peningkatan ilmu dan pengetahuan.
- d.Pada akhirnya mampu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat akan lebih baik. (sumber profil desa wisata Srikeminut)

Kebijakan Umum:

- a.Pembaharuan obyek wisata yang sudah ada dan yang belum berjalan
- b.Pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi
- c.Penyadaran tentang sapta pesona pariwisata (sumber profil desa wisata Srikeminut)

Berdasarkan beberapa penyampaian informasi di atas dapat diartikan bahwa secara umum dalam tahap pelaksanaan dapat di katakan sudah berjalan sesuai dengan proses yang dirumuskan. Hal ini di tunjukan dengan adanya manfaat yang masyarakat rasakan dengan adanya desa wisata. Masyarakat di sekitar lokasi wisata sedikit merasakan efek atau dampak dari adanya desa wisata, sehingga

masyarakat sekitar juga ikut di berdayakan dengan berbagai kegiatan atau program dari desa wisata.

Dari sisi fasilitas, baik sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktivitas di tempat wisata sebenarnya sudah cukup memenuhi namun dilihat masih banyak yang masih menjadi kekurangan juga. Hal ini bisa di lihat dari fasilitas jalan yang masih banyak yang rusak dan juga kondisi jalan yang masih kecil sehingga sangat mengganggu aktivitas keluar masuk para pengunjung. Apalagi wilayah desa Srikeminut juga salah satu daerah rawan bencana sehingga fasilitas-fasilitas dasar seperti jalan, jembatan dan lain-lain sangat penting untuk di perhatikan dan spot-spot wisata yang ada juga sangat perlu untuk di tata kembali khususnya di sepanjang sungai oyo. Hal lain juga yang perlu di perhatikan yaitu soal ketersediaan jaringan internet. Karena wilayah Srikeminut yang memang berada di dataran rendah dan diapiti bukit-bukit yang tinggi sehingga soal jaringan internet disana juga masih cukup terganggu. Perlu di perhatikan faktor lain juga yang menjadi catatan dan kekurangan juga yaitu dalam hal kerja sama dan koordinasi dari semua elemen yang ada. Dilihat bahwa dari semua bentuk kerja sama yang ada baik dengan pihak pemerintah maupun yang di luar pemerintah juga kegiatannya kadang hanya sampai pada tahap sosialisasi atau pelatihan. Namun setelah pelatihan atau sosialisasi tidak ada keberlanjutan yang membuat beberapa hal yang pernah di buat bersama tidak terurus dengan baik misalnya dalam bidang pertanian yang pernah bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Hal ini juga

menunjukkan lemahnya koordinasi awal baik dari pihak pengelola, pemerintah desa, dinas-dinas terkait dan bahkan lembaga di luar pemeritahan dan juga masyarakat itu sendiri sehingga apa yang menjadi poin kerja sama diawal tidak bisa berjalan dengan baik. Lemahnya fungsi koordinasi juga terlihat dalam internal para kelompok pengelola, hal ini terbukti dengan di beberapa titik lokasi spot wisata tidak terurus dengan baik, baik soal kebersihan dan keindahan juga terutama soal MCK, pengaturan retribusi parkir dan lahan untuk parkir. Soal koordinasi juga kadang kurang berjalan baik antara pemerintah desa dengan pihak pengelola seperti yang pernah terjadi bahwa pemerintah desa menerima tamu untuk berwisata di Srikeminut namun ternyata teman-teman di lapangan belum ada persiapan sehingga kegiatannya kurang berjalan baik.

Pengendalian. Menurut Manullang dalam (Suriansyah 2014), pengendalian atau pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoresksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitan ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsistensi inilah relevansinya pengawasan dilakukan. Keberhasilan suatu bentuk pengawasan apakah itu yang berada dalam kelembagaan public misalnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif maupun pengawasan di kelembagaan privat sangat ditentukan kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi maupun yang

mengawasi sesuatu kegiatan di bidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan. Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh beberapa informan, menunjukkan bahwa proses pengawasannya sudah di lakukan selama ini oleh kelompok pengelola dan bentuk pengawasannya seperti sering mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas serta mengevaluasi segala bentuk masukan dan kritikan yang ada. Namun yang menjadi masalah ialah bahwa apa yang menjadi hasil pertemuan atau musyawarah sering kali tidak di jalankan. Hal ini menunjukan kinerja kelompok pengelola ini kurang berjalan dengan baik dan hal ini merujuk pada kenyataan di lapangan bahwa pengelolaannya memang terlihat seperti tidak terurus dengan baik. Hal lain juga yang terlihat yaitu peran seorang ketua yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya terutama soal ketegasan dan bagaimana mengakomodir para anggotanya. Hal lain juga yaitu persoalan yang terjadi di tingkatan elit-elit padukuhan. Hal ini juga dilihat sebagai salah satu faktor penghambat.

a. Institusi Wisata

1. Lembah Sorory

Potensi destinasi wisata Lembah Sorory terletak pada suasana alam yang menenangkan di pinggiran sungai, dengan rindangnya pohon bambu yang menciptakan suasana teduh serta pemandangan indah dari Sungai Opak. Selain itu, Lembah Sorory menawarkan berbagai wahana permainan modern dan tradisional yang cocok untuk anak-anak maupun

orang dewasa, menjadikannya sebagai tujuan wisata yang ideal untuk keluarga. Lembah Sorory juga memiliki potensi wisata edukasi, seperti belajar berwirausaha, contohnya dalam pembuatan rempeyek, yang memberikan pengalaman praktis bagi pengunjung.

2. Desa Wisata Srikeminut

Potensi destinasi wisata di Srikeminut mencakup berbagai jenis wisata alam dan budaya yang menarik, serta berbagai UMKM yang dapat menunjang kegiatan wisata. Berikut adalah potensi yang ada:

a. Wisata Alam:

1. Air Terjun Watulawang
2. Panorama Terasering dan Panggung Sonoseneng
3. Puncak Watu Manjung
4. Puncak Ngledok
5. Menara Pandang Puncak Pengklik
6. Area Persawahan
7. Sungai Oya dan Padang Batukali
8. Trekking
9. Area Camping
10. Sepeda Air
11. Prosotan di Sungai
12. Wisata Pertanian Techno Eco Edupark

b. Wisata Budaya:

1. Jathilan
2. Gejog Lesung
3. Karawitan
4. Kethoprak
5. Tegluk
6. Hadroh
7. Campursari

c. Taman Girli Indah:

Potensi destinasi wisata ini mencakup berbagai fasilitas yang dapat menarik pengunjung, antara lain:

- Perahu
- Taman Bermain
- Pendopo
- Masjid
- Toilet
- Kolam Renang Anak
- Warung Kuliner

d. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah):

Srikeminut juga memiliki berbagai UMKM yang menawarkan produk makanan dan kerajinan lokal, seperti:

1. Soe See Cake Snack
2. Omah Nasi Goreng
3. Lotek Dah Tahu Guling Kariyah
4. Shin Craft (Kerajinan Macrame Demen)
5. Peyek Kurnia (Peyek Kacang)
6. Aneka Jus Krismiatur
7. Angkringan Mujirah
8. Keripik Sayuran Flora
9. Toko Bella
10. Abi Snak
11. Erni Kerajinan Kayu Stoll
12. Waroeng Fadhil
13. Jajanan Alesha
14. Peyek Iqbal Rizky (Peyek Kacang)
15. Dapur Mak Aksa

Keberagaman destinasi alam, budaya, fasilitas, serta potensi UMKM yang ada di Srikeminut memberikan berbagai pilihan bagi pengunjung untuk menikmati wisata yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi lokal.

5. Program pemberdayaan Kalurahan Sriharjo

Pemberdayaan Perempuan	Desa Preneur	Pemeliharaan Air	Pemberdayaan Pemuda Tani	Pemberdayaan Ibu-ibu PKK	Pemberdayaan Ekonomi
Pelatihan Kerja	Pelatihan Penjualan	Angkat Walet	Pelatihan Marketing Online	Pelatihan Untuk Lansia dan Balita	Permodalan
Pembinaan Usia Pernikahan	Pelatihan Kelompok Tani	Pembersihan Irigasi	Pelatihan Penjualan Produk	Rekrutmn Kader	Koperasi
Pelatihan Keterampilan	Pelatihan peternakan				
Kesetaraan gender					
Pelatihan Kelompok Wanita Tani					

BAB III

PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI KALURAHAN SRIHARJO

A. Pengembangan Wisata Oleh Kalurahan Sriharjo

Pemerintah Kalurahan Sriharjo memiliki kewenangan untuk memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan berbasis hak asal-usul dan adat istiadat. Dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu aspek penting yang melibatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, serta pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada di setiap padukuhan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa tidak hanya merupakan kewenangan, tetapi juga kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 UU Desa. Hal ini mencerminkan pentingnya kesadaran akan peran pemberdayaan masyarakat, yang menjadi fokus serius pemerintah desa.

“Pengembangan desa wisata memang menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan saat ini mas, dan peran pemerintah kalurahan sangat krusial untuk mengimplementasikan program desa wisata mas. Hal yang harus di perhatikan pertama, sumber daya manusia. Kualitas aparatur desa sangat menentukan keberhasilan program. Mereka harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pariwisata, manajemen, dan pemasaran mas. Kedua, sumber daya keuangan.

Anggaran yang memadai sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan desa wisata, mulai dari infrastruktur hingga promosi mas. Ketiga, dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi. Koordinasi yang baik antara pemerintah kalurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sangat krusial. Terakhir, partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, program desa wisata sulit untuk berjalan dengan sukses.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Pemerintah Kalurahan Sriharjo berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui dorongan di bidang pertanian, UMKM, dan pariwisata sebagai cara untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal. Dalam sektor pertanian, pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis tinggi. Di bidang UMKM, mereka mendukung para pelaku usaha dengan memberikan fasilitas, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas. Sementara di sektor pariwisata, pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan memperkenalkan budaya serta potensi alam Desa Sriharjo. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan di wilayah tersebut. Prakarsa yang berkembang dari masyarakat ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan melalui kebijakan dan penganggaran. Pemerintah Kalurahan Sriharjo yakin bahwa masyarakat lebih memahami potensi dan permasalahan mereka, sehingga dengan memberikan dorongan dan fasilitasi, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah sendiri.

“Peraturan kalurahan tentang peraturan desa wisata atau RKP (Rencana kerja

Pemerintahan) Tahun 2024/2025. Peraturan Kalurahan tentang penjabaran (RAB) yang digunakan untuk mengatur Desa Wisata. Makanya mas kita masih pada tahap awal pembangunan mas, dimana proses ini butuh waktu dan kesiapan penuh. Mekanismenya mas, disusun melalui musyawarah Dusun, Musyawarah kalurahan, Musreng Bangkal (Musyawarah Perencanaan Pembangunan kalurahan), RKP (Rencana kerja Pemerintahan), Masuk ke APBDs lalu dilaksanakan. Nah kita kan sudah punya dasarnya, dan baru Pokdarwis diresmikan dan anggotanya pun baru di lantik lewat SK dari bupati mas. Untuk sumber dananya mas sumber dana yang digunakan untuk program Desa Wisata dari dana keistimewaan Yogyakarta tahun ini dapat 5 M kemudian dana dari desa sebesar 300 Juta. Selanjutnya mas Pendapatan secara langsung belum ada karena Peraturan kalurahan melarang adanya penarikan dana retribusi bagi pengunjung. Termasuk dana parkir, krena termasuk wewenang Pemda. Jadi belum signifikan, karena langsung ke masyarakat.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Sriharjo berlandaskan pada prakarsa masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UU Desa, yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan prakarsa masyarakat itu sendiri.

“Secara umum mas, kebijakan yang diterapkan dalam mendukung adanya pengembangan desa wisata, belum banyak responnya. Kecuali di beberapa tempat yang menjadi sasaran Desa wisatanya. Misalnya di Padukuhan Sriharjo, Kedung Miri, Wunut respon masyarakat luar biasa. Namun dengan adanya 13 padukuhan belum semua nya merespon, karena kebijakanya belum berdampak kepada semuanya mas. Selanjutnya karena ini masih tahap awal pengembangan mas, Pertama kami memetakan potensi–potensi di Kalurahan Sriharjo. Lalu dipetakan dan dikaji baik itu potensi, kelebihan dan kelemahan nya, Lalu membentuk Pokdarwis, pengelola desa wisata dan lain sebagainya. Jika SDM

siap maka kami akan mempublis terkait desa wisata di Kalurahan Pucung ini mas. Selanjutnya mas, Ada dua hal yaitu pertama dari SDM nya mau tidak mau harus melakukan pelatihan, pendekatan dan menyadarkan warga masyarakat. Infrastruktur mau tidak mau harus melakukan pembangunan, baik menggunakan dana desa atau biaya dari Provinsi. Selanjutnya mas, Karena baru mulai, yaitu tiga tempat di Dusun Sriharjo, Kedung Miri dan Wunut. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya dengan adanya kunjungan. Misalnya warung-warung disekitarnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya Desa wisata tersebut. Pokdarwis sudah menerima SK gubernur, dan pengelola wisata sudah ber SK bupati kemudian untuk Pengembangannya selain tadi yang disampaikan melakukan pelatihan, membangun kawasan dan infrastrukturnya sepenuhnya akan diserahkan kepada Bumkal.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) sebagai salah satu bentuk fasilitasi terhadap prakarsa masyarakat. Dalam menentukan kelompok sasaran untuk pengembangan desa wisata, Pemerintah Kalurahan berfokus pada potensi yang dimiliki oleh setiap padukuhan. Setiap padukuhan biasanya memiliki kekayaan alam, budaya, atau tradisi yang berbeda, yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Oleh karena itu, pemilihan kelompok sasaran didasarkan pada potensi unik yang ada di setiap wilayah.

Setelah kelompok sasaran ditentukan, pemerintah memberikan dorongan dan fasilitas untuk mengembangkan potensi tersebut. Fasilitas yang diberikan bisa berupa pelatihan, pendanaan, infrastruktur, serta akses informasi dan pemasaran. Melalui pendekatan ini, pemerintah kalurahan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat agar mereka dapat secara mandiri mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa yang ada, sehingga dapat

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah kalurahan sudah berusaha keras untuk mengembangkan desa wisata kita. Jalan-jalan sudah diperbaiki, banyak tempat wisata baru yang dibuka, dan ada beberapa pelatihan juga untuk warga. Tapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mas. Salah satunya keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang kompeten mas. Untuk mengatasinya, pemerintah kalurahan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kalurahan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas warga dan staf kalurahan mas. Pemerintah kalurahan harus meningkatkan kapabilitas mereka, terutama dalam hal inovasi dan penggunaan teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak perlu diperkuat untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. menyiapkan program desa wisata, desa enterpreneur, desa seni budaya, dan desa mandiri yang siap untuk diverifikasi, yang merupakan pencapaian penting dalam pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara dengan Kuswoyo, Carik Sriharjo, 20 Oktober 2024).

Selain kebijakan, fasilitas lain yang diberikan termasuk anggaran untuk mendukung prakarsa masyarakat, seperti dalam pendirian BUMKAL dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan studi banding untuk mengembangkan potensi, terutama dalam sektor pariwisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan individu dalam mengelola potensi wisata daerah, serta memperluas pengetahuan dengan belajar dari daerah lain

Namun, pemerintah Kalurahan Sriharjo menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, konflik antar pengelola pariwisata, dan keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat

Meski begitu, Pemerintah Kalurahan Sriharjo telah menyiapkan program desa wisata, desa enterpreneur, desa seni budaya, dan desa mandiri yang siap untuk diverifikasi, yang merupakan pencapaian penting dalam pemberdayaan masyarakat. Desa wisata, yang masih dalam tahap pengembangan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan potensi alam dan budaya.

“Pertama kami memetakan potensi–potensi di Kalurahan Sriharjo. Lalu dipetakan dan dikaji baik itu potensi, kelebihan dan kelemahan nya, Lalu membentuk Pokdarwis, pengelola desa wisata dan lain sebagainya. Seluh potensi yang telah terpetakan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat. Konsultasi publik ini yang kemudian menjadi dasar dari Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa yang diusulkan dan dibahas pada Badan Musyawarah Kalurahan. Selanjutnya mas, Ada dua hal yaitu pertama dari SDM nya mau tidak mau harus melakukan pelatihan, pendekatan dan menyadarkan warga masyarakat. Infrastruktur mau tidak mau harus melakukan pembangunan, baik menggunakan dana desa atau biaya dari Provinsi. Selanjutnya mas, Karena baru mulai, yaitu tiga tempat di Dusun Sriharjo, Kedung Miri dan Wunut. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya dengan adanya kunjungan. Misalnya warung–warung disekitarnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya Desa wisata tersebut. Pokdarwis sudah menerima SK gubernur, dan pengelola wisata sudah ber SK bupati kemudian untuk Pengembangannya selain tadi yang disampaikan melakukan pelatihan, membangun kawasan dan infrastrukturnya sepenuhnya akan diserahkan kepada Bumkal.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Pemerintah Kalurahan Sriharjo mengembangkan desa wisata dengan pendekatan berbasis komunitas. Langkah pertama adalah melakukan analisis pemetaan potensi wisata, termasuk potensi alam, budaya, dan objek buatan yang ada. Selain itu, sarana dan prasarana, seperti jalan dan fasilitas umum,

juga dibangun untuk mendukung pengembangan desa wisata. Yang terpenting, partisipasi masyarakat dan pihak swasta menjadi kunci dalam kesuksesan pembangunan desa wisata ini.

Potensi wisata yang dimiliki oleh Kalurahan Sriharjo, seperti Srikeminut (wisata alam), Sorori (wisata buatan), dan Eduteknopark (wisata edukasi), menjadi dasar kebijakan desa wisata yang dilaksanakan. Kebijakan ini dihasilkan melalui proses konsultasi publik dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Sebagai langkah nyata, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber daya dalam pembangunan desa wisata.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan desa wisata dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang, serta melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Salah satu cara melibatkan masyarakat adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kelompok ini berperan dalam mengawasi dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan destinasi wisata secara rutin. Selain itu, POKDARWIS juga memberikan pelatihan dan mengatur acara budaya.

“karena ini masih tahap awal pengembangan mas, Pertama kami memetakan potensi–potensi di Kalurahan Sriharjo. Lalu dipetakan dan dikaji baik itu

potensi, kelebihan dan kelemahan nya, Lalu membentuk Pokdarwis, pengelola desa wisata dan lain sebagainya. Jika SDM siap maka kami akan mempublis terkait desa wisata di Kalurahan Pucung ini mas. Selanjutnya mas, Ada dua hal yaitu pertama dari SDM nya mau tidak mau harus melakukan pelatihan, pendekatan dan menyadarkan warga masyarakat. Infrastruktur mau tidak mau harus melakukan pembangunan, baik menggunakan dana desa atau biaya dari Provinsi. Selanjutnya mas, Karena baru mulai, yaitu tiga tempat di Dusun Sriharjo, Kedung Miri dan Wunut. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya dengan adanya kunjungan. Misalnya warung-warung disekitarnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya Desa wisata tersebut. Pokdarwis sudah menerima SK gubernur, dan pengelola wisata sudah ber SK bupati kemudian untuk Pengembangannya selain tadi yang disampaikan melakukan pelatihan, membangun kawasan dan infrastrukturnya sepenuhnya akan diserahkan kepada Bumkal.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Pemerintah desa berupaya mendorong warga untuk lebih aktif dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui pendirian usaha-usaha yang sesuai dengan kebutuhan wisata. Namun, dalam tahap pengembangan ini masih ada kendala, seperti keterbatasan dana dan kekurangan tenaga ahli dalam pengelolaan desa wisata.

“Selanjutnya mas, Karena baru mulai, yaitu tiga tempat di Dusun Sriharjo, Kedung Miri dan Wunut. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya dengan adanya kunjungan. Misalnya warung-warung disekitarnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya Desa wisata tersebut. Pokdarwis sudah menerima SK gubernur, dan pengelola wisata sudah ber SK bupati kemudian untuk Pengembangannya selain tadi yang disampaikan melakukan pelatihan, membangun kawasan dan infrastrukturnya sepenuhnya akan diserahkan kepada Bumkal. Hal ini menjadi penting bagi pengembangan Desa wisata karena keberadaan Desa wisata juga harus memperhatikan keselarasan antara peningkatan ekonomi dan kelstarian budaya.” (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Meskipun pengembangan desa wisata masih dalam tahap awal, pemerintah telah menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk pengembangan tersebut. Pemerintah memandang bahwa tujuan utama pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal yang selaras dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap bentuk pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan keseimbangan ketiga aspek tersebut. Pemerintah menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk mencapai tujuan ini, dengan melakukan analisis mendalam mengenai langkah-langkah yang akan diambil.

“Di Kalurahan Sriharjo kegiatan wisata sudah berjalan. Namun, saya merasa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program masih kurang mas di Kalurahan Sriharjo. Banyak kendala yang kami hadapi. Salah satunya adalah terbatasnya akses terhadap informasi dan pelatihan. Seringkali, pelatihan-pelatihan yang diadakan lebih banyak ditujukan untuk orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Saya juga kadang kesal harusnya Pemerintah kalurahan perlu membuat kebijakan yang lebih inklusif, yang memberikan ruang bagi masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi mas.” (Wawancara dengan Alif, Sub Pengelola Wisata Srikeminut, 18 Oktober 2024)

Namun, implementasi model pengembangan desa wisata belum berjalan dengan optimal, bahkan terkesan lambat. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung dari desa wisata. Selain itu, pemerintah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan. Biasanya, masyarakat hanya dilibatkan dalam rapat-rapat singkat tanpa terlibat langsung dalam eksekusi program pembangunan lebih lanjut. Akibatnya, masyarakat cenderung merasa bukan sebagai pihak

yang aktif dalam pembangunan desa wisata ini.

“Pemerintah Kalurahan haruslah memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan desa wisata yang ada di kalurahan. Kalurahan bersama BUMKal bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek terkait pengembangan desa wisata. Kapabilitas pemerintah kalurahan sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan ini mas. Dimana kesinergisan dan kualitas daripada SDM untuk mengelola aset desa itu yang jadi tantangan tersendiri. Karena kita dalam pemetaan desa wisata ini masih merababab mas, masih mengembangkan jadi kita butuh banyak belajar dari semua pihak yang berwenang dan kompeten. Selanjutnya juga Saya berharap pemerintah kalurahan terus meningkatkan anggaran guna meningkatkan kapabilitas kita bersama melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Inovasi dalam pengelolaan dan promosi desa wisata juga sangat penting agar desa wisata bisa bersaing di tingkat provinsi. Terakhir, saya berharap pemerintah kalurahan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi kebijakan.” (Wawancara dengan Alif dan Suyanto, Sub Pengelola Wisata Srikeminut dan Masyarakat, 18 Oktober 2024)

Meskipun anggaran untuk pengembangan desa wisata sudah dialokasikan, prosesnya tetap berjalan lambat. Masyarakat sangat antusias dalam setiap musyawarah yang membahas pengembangan desa wisata, namun proses yang lambat mempengaruhi potensi peningkatan ekonomi lokal. Implementasi kebijakan desa wisata juga belum berjalan dengan baik, dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan usaha pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk terlibat lebih dalam dalam pengembangan desa wisata.

“Secara umum, pemerintah kalurahan belum cukup baik dalam mendukung pengembangan desa wisata. Banyak program dicanangkan tetapi minim realisasi mas. Perlu diakui bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi dan penyediaan sumber daya yang lebih memadai mas. Harapan Padukuhan program Desa wisata dapat meningkatkan perekonomian di Padukuhan terutama untuk warganya. Mas, adanya program desa wisata Kalurahan Pucung baru merintis mas. Yang mana belum mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan mas. Baru ada beberapa saja di objek wisata mas. Itupun masih belum banyak. yang penting ini mas, koordinasi antara pemerintah kalurahan, dusun, dan kelompok masyarakat juga perlu ditingkatkan agar program-program yang ada bisa berjalan lebih efektif. “
(Wawancara dengan Suyanto, Masyarakat Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Masalah utama dalam pengembangan desa wisata adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Meskipun komunikasi intens dilakukan, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan jika masyarakat tidak terlibat sepenuhnya. Pemerintah Kalurahan Sriharjo telah berusaha mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki Kalurahan Sriharjo untuk menciptakan destinasi wisata. Desa Wisata Srikeminut adalah salah satu destinasi wisata yang muncul sebagai hasil prakarsa masyarakat dalam mengembangkan wisata di daerah tersebut.

“Di Kalurahan Sriharjo, Skema model yang kita rancang, analisis dan mencoba bertahap mengembangkan mas. Model pengembangan desa wisata berfokus pada peningkatan infrastruktur, promosi wisata, pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Setiap tahap pengembangan wisata melibatkan masyarakat lokal, karena kami menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Dalam model ini, masyarakat sangat penting. Mereka adalah pelaku utama dalam pengelolaan wisata dan juga penerima manfaat. Kami membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dari warga setempat untuk mengawasi destinasi wisata, memberikan pelatihan, dan mengatur acara budaya. Kami juga mendorong

warga untuk mendirikan bisnis yang mendukung aktivitas wisata. Meskipun telah dianggarkan dalam APBDes karena konsekuensi dari kebijakan Desa wisata namun keterbatasan dana serta sumber daya manusia yang berpengalaman merupakan masalah utama. Untuk mengatasi masalah ini, kami bekerja sama dengan investor, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah”. (Wawancara dengan Titik Istiyawatun, Lurah Sriharjo, 18 Oktober 2024)

Dalam upaya mengembangkan destinasi wisata yang telah diciptakan, Pemerintah Kalurahan Sriharjo mengeluarkan kebijakan Desa Wisata sebagai bagian dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan wisata. Kebijakan ini juga diikuti dengan penetapan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti pelatihan dan studi banding, serta bantuan modal untuk usaha-usaha masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata dengan membentuk POKDARWIS. Melalui POKDARWIS, berbagai destinasi wisata, termasuk Srikeminut, berhasil dibangun. POKDARWIS juga berperan dalam pengawasan destinasi wisata di Kalurahan Sriharjo dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan acara kebudayaan, yang tentu berkontribusi positif terhadap perkembangan wisata di Kalurahan Sriharjo.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu meliputi: 1) Pengembangan wisata oleh Kalurahan Sriharjo; 2) Pemberdayaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Adapun temuan peneliti terkait kedua fokus penelitian tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pengembangan wisata oleh Kalurahan Sriharjo. Berdasarkan temuan peneliti bahwa pengembangan wisata Desa di Kalurahan Sriharjo sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Desa Wisata yang berimplikasi bahwa pengembangan wisata oleh pemerintah Kalurahan Sriharjo menjadi bagian yang juga dibiayai oleh anggaran yang dimiliki oleh Kalurahan Sriharjo, telah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari masyarakat setempat, dan juga telah mampu membentuk destinasi wisata yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Sriharjo. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, dari 13 Padukuhan yang ada di Kalurahan Pucung hanya terdapat 3 Padukuhan saja yang sudah berjalan wisata Desanya, yaitu di Padukuhan Sriharjo, Kedung Miri dan Wunut.

Sementara untuk padukuhan yang lainnya masih dalam tahap perencanaan dan pemetaan potensi untuk pembukaan *spot* wisata baru di beberapa titik Padukuhan. Lambatnya proses pembukaan *spot* wisata baru tersebut juga berpengaruh pada proses pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo menjadi stagnan, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomis bagi peningkatan warga setempat. Lebih lanjut, dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Desa Wisata tersebut, yaitu karena masih minimnya peran pemerintah Kalurahan Sriharjo itu sendiri yang dalam mengembangkan potensi sumber daya wisata yang ada, kurangnya sosialisasi program terhadap warga masyarakat, dan kurang masifnya pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan antusiasme mereka dalam mendukung pengembangan wisata tersebut. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam temuan peneliti di lapangan, diketahui bahwa model yang digunakan dalam pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo yaitu melalui pendekatan berbasis komunitas. Artinya, melalui pendekatan yang berbasis komunitas ini, masyarakat setempat merupakan subjek utama dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo. Hal tersebut terbukti dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga merupakan serangkaian konsep pembangunan yang tidak terpisahkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat kalurahan melalui program pengembangan Desa Wisata. Namun dalam perkembangannya saat ini, proses penguatan komunitas lokal melalui Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata lebih lanjut kedepannya

belum berjalan signifikan. Hal ini dikarenakan masih minimnya upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat oleh pemerintah Kalurahan, sehingga mempengaruhi kinerja Pokdarwis yang menjadi lamban dan belum maksimal dalam mengembangkan Desa Wisata. Memang dalam praktiknya, telah dilakukan beberapa kali pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata. Tetapi hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut belum teraplikasikan secara maksimal khususnya oleh Pokdarwis maupun masyarakat Sriharjo pada umumnya. Hal ini juga dipengaruhi karena masih minimnya peran pemerintah Kalurahan itu sendiri dalam melakukan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut. Sebab pasca kegiatan pelatihan, pemerintah Kalurahan jarang melakukan *follow up* dan pembackupan lebih lanjut terhadap Pokdarwis dan masyarakat pengelola wisata lainnya. Disisi lain sebagian warga masyarakat masih skeptis dalam memandang program Desa Wisata, dimana masyarakat itu sendiri masih kurang yakin bahwa melalui program tersebut dapat meningkatkan perekonomian Kalurahan dan kesejahteraan mereka.

B. Saran

Adapun saran peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapabilitas Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam implementasinya perlu mengoptimalisasi pengembangan Desa Wisata melalui pemetaan potensi

wisata di setiap Padukuhan yang disertai dengan perolehan izin penggunaan lahan dari pihak Kraton Yogyakarta.

2. Komunikasi pemerintah kalurahan dalam membangun desa wisata harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung di setiap *spot* wisata.
3. Membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai *stakeholder*.
4. Model pengembangan pembangunan desa wisata berbasis komunitas harus sinergitas antara pemerintah Kalurahan, BUMKal, Pokdarwis dan masyarakat setempat serta dengan pihak ketiga perlu ditingkatkan lagi.

Pemerintah Kalurahan Pucung perlu mengembangkan SDM masyarakat setempat terutama BUMKal dan POKDARWIS melalui kegiatan pelatihan yang *up to date* dan berkelanjutan serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan Desa Wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwandi. (2016). Studi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kawasan Objek Wisata Pantai Pa ' Badilang Kecamatan Bontomatene. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 22–26.
- Auliya, A., & Farrah. (2019). Model Pengembangan Destinasi Pariwisata(Studi Kasus Tegal, Jawa Tengah) Model Of Tourism Destination Development Tegal Case Study, Central Java. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 4(1), 1–85. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Cahyaningrum, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/6143/>
- Cholisin. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011)*. 19–20. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.pdf)
- Eko Sudarmanto. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Feny Rita Fiantika et all. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Salsabila, S. N., Anshori, I., Kamil, A., & Jamilati, N. (2024). Strategi Inovatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Industri Parawisata di Bangkalan. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 2(1), 176–190. <https://doi.org/>
- SS, H. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah*

Pendekatan Konsep). Graha Ilmu.

Sugiarti, R., Istijabatul, A., & Yudana, G. (2010). *Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi*.

Suwarti, S. (2015). Pengembangan Destinasi Desa Wisata Kampung Keji Sebagai Atraksi Wisata Guna Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Kabupaten Semarang. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata, Vol 12, No 1* (2015): *GEMAWISATA MEI 2015*. <http://stiepari.greenfrogs.co.id/jurnal/index.php/JT/article/view/55/49>

Suwarti, & Yuliamir, H. (2017). Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Kampung Keji Sebagai Atraksi Wisata Guna Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 13, 1–23. <http://stiepari.greenfrogs.co.id/jurnal/index.php/JT/article/view/55/49>

Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka* (Issue August).

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 24 Tahun 2014, 2014 1.
https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Aunsir.salford.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha

UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pub. L. No. 5 Tahun 1979, 91 498.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 Tahun 2014, 45.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat wacana dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

PANDUAN WAWANCARA

Tujuan:

1. Mengumpulkan informasi tentang profil narasumber
2. Menyusun pemahaman tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat
3. Mengidentifikasi kontribusi desa wisata dalam pengembangan pariwisata desa
4. Menilai peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata
5. Menilai sejauh mana pemberdayaan masyarakat berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata
6. Menganalisis peran serta Pemerintah Desa, desa wisata, dan Pokdarwis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

Daftar Pertanyaan

1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pemerintah Desa

Identitas narasumber:

Nama

Usia

Pekerjaan

Daerah asal

Jabatan di Pemerintah Desa

Pertanyaan:

1. Bagaimana Kalurahan Sriharjo menjalankan metode pemberdayaan masyarakat desa?
2. Apa alasan Kalurahan Sriharjo memilih metode tersebut dalam pemberdayaan masyarakat desa?
3. Bagaimana cara Pemerintah Kalurahan Sriharjo memilih kelompok sasaran untuk pemberdayaan masyarakat?
4. Apa alasan pemilihan kelompok tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Sriharjo?
5. Apa saja pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa di Kalurahan Sriharjo?

b. Kebijakan Desa Wisata

Identitas narasumber:

Nama

Usia

Pekerjaan

Daerah asal

Jabatan di pengelola desa wisata

Pertanyaan:

1. Mengapa ada kebijakan desa wisata di Kalurahan Sriharjo?
2. Bagaimana proses penyusunan kebijakan desa wisata dilakukan di Kalurahan Sriharjo?
3. Apa yang membedakan tradisi dan budaya khas yang dimiliki oleh Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
4. Bagaimana cara menjaga dan melestarikan tradisi serta kebudayaan khas tersebut?
5. Bagaimana aksesibilitas menuju Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
6. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Wisata?
7. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan prasarana di Desa Wisata Kalurahan Sriharjo?

2. Pokdarwis sebagai Institusi Lokal

Identitas narasumber:

Nama

Usia

Pekerjaan

Daerah asal

Jabatan di Pokdarwis

Pertanyaan:

1. Bagaimana Pokdarwis terlibat dalam perumusan kebijakan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Pokdarwis di Desa Wisata Kalurahan Sriharjo?
3. Bagaimana pandangan masyarakat dan anggota terkait dengan keberadaan Pokdarwis?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
5. Bagaimana Pokdarwis meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat melalui Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
6. Apa saja pencapaian dan hambatan yang dihadapi Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo?
7. Bagaimana Pokdarwis memahami peranannya dalam pengembangan Desa Wisata?
8. Bagaimana hubungan Pokdarwis dengan Pemerintah Kalurahan Sriharjo?

Lampiran 2

Foto-foto Penelitian



(Dokumentasi bersama Bu Titik Istiyawatun selaku Lurah Sriharjo)



(Dokumentasi bersama Bapak Alif selaku Sub Pengelola Wisata Srikeminut)



(Dokumentasi bersama Pak Suyanto selaku Masyarakat Desa Sriharjo)



(Dokumentasi bersama Pak Kuswoyo selaku Carik Sriharjo)

Lampiran 3

Surat balasan dari Kalurahan Sriharjo



Lampiran 4
Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

Alamat : J. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515985, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 367/II/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Dominikus Savio Ronaldo Dappa Loka
Nomor Mahasiswa : 19520173
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Fenomologi di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 3 September 2024

Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta
Jl. Tirokro No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 701/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Dominikus Savio Ronaldo Dappa Loka
No Mhs : 19520173
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Fenomologi di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
Tempat : Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 September 2024

Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
NID. 170 230 190